

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR
TANGGUH DI TELUKNAGA, TANGERANG, BANTEN**

**COMMUNITY ATTITUDES TOWARDS RESILIENT COASTAL VILLAGE DEVELOPMENT
PROGRAM IN TELUKNAGA, TANGERANG, BANTEN**

Nini Kusrini

Mahasiswa Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor
Gd. FEMA, Wing 1 Level 5, Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telp. 0251-8425252, 8627793, 8621902, Fax. 0251-8627793
E-mail: nini.kusrini@yahoo.co.id

Siti Amanah

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor
Gd. FEMA, Wing 1 Level 5, Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telp. 0251-8425252, 8627793, 8621902, Fax. 0251-8627793
E-mail: sitihanama@gmail.com; siti_amanah@ipb.ac.id

Anna Fatchiya

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor
Gd. FEMA, Wing 1 Level 5, Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telp. 0251-8425252, 8627793, 8621902, Fax. 0251-8627793
E-mail: annafatchiya@yahoo.com

Diterima: 15 Juni 2013, Direvisi: 15 Agustus 2013, Disetujui: 30 Agustus 2013

Abstract

Coastal community has exposed to natural resource degradation, climate change, and disaster risks. The government, civil society organization, and other institutions have developed various programs to improve the situation. One of the program is Coastal Resilient Village Development Program (CRVDP) that has been launched since 2011. In year 2012, the program was implemented in 48 villages in 16 districts. The success of the program depends on the community responses include the attitude of the community. To research the attitude of the community to the program, two villages in Tangerang District were chosen. The population of the program beneficiaries was 200 households. A stratified random sampling based on the focused activity of CRVDP (resources improvement, infrastructure and environmental development, business development, and disaster risks management) was used to select the respondents. A number of the sample were 60 households. A questionnaire consisted of questions about individual characteristics, social environmental characteristics, and program management was used to gathered data. Interviews and field observation were conducted to learn the community attitude and program implementation. Rank-Spearman Analysis was used to analyse the correlation amongst the variables related to the community attitude. The results show that community attitude has a significant positive correlation with socio environmental characteristics and program management. Community positive attitude to the program can be improved through the role of community leaders, continual extension program activities supported by competent field facilitators. Positive attitude community to the CRVDP will contribute to the success program implementation.

Keywords: Coastal communities, CRVDP, community empowerment.

Abstrak

Masyarakat pesisir telah mengalami kerusakan sumber daya alam, perubahan iklim, dan risiko bencana. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya telah mengembangkan berbagai

program untuk memperbaiki kondisi wilayah pesisir. Salah satu programnya adalah Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang telah diluncurkan sejak tahun 2011. Pada tahun 2012, program ini dilaksanakan di 48 desa di 16 kabupaten. Keberhasilan program ini tergantung pada respon masyarakat termasuk sikap masyarakat. Penelitian tentang sikap masyarakat terhadap program ini, dilaksanakan di dua desa terpilih di Kabupaten Tangerang. Populasi berjumlah 200 yang merupakan masyarakat pemanfaat program. Responden dipilih secara stratified random sampling berdasarkan fokus kegiatan PDPT (bina sumber daya, bina infrastruktur dan lingkungan, Bina Usaha, dan bina Siaga bencana). Sampel penelitian sebanyak 60 responden yang diambil dari rumah tangga masyarakat pesisir. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tentang karakteristik individu, karakteristik lingkungan sosial, dan pengelolaan program. Wawancara dan observasi lapangan dilakukan untuk mempelajari sikap masyarakat dan pelaksanaan program. Analisis rank-Spearman digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang berhubungan dengan sikap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan karakteristik lingkungan sosial dan tingkat pengelolaan program. Sikap positif masyarakat terhadap program ini dapat ditingkatkan melalui peran tokoh masyarakat, kegiatan program penyuluhan berkelanjutan yang didukung oleh fasilitator lapangan yang kompeten. sikap positif masyarakat terhadap PDPT akan memberikan kontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program.

Kata kunci: Masyarakat pesisir, PDPT, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sejahtera, adil dan beradab, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun hingga saat ini, pembangunan nasional belum mampu mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada kondisi yang ada di wilayah desa pesisir Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP 2011) mengemukakan bahwa saat ini desa-desa pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, dimana tercatat sebanyak 7 juta jiwa di 10.639 desa pesisir; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan luntturnya nilai-nilai budaya lokal; serta (4) rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini memberikan andil terhadap tingginya kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim pada desa-desa pesisir.

Upaya yang selama ini dilakukan pemerintah dalam membangun masyarakat pesisir belum memberikan hasil yang maksimal, sebagaimana yang hasil penelitian Razali (2004: 61-68) bahwa tingkat kesejahteraan pelaku perikanan masih berada di bawah sektor-sektor lain. Sejalan dengan hal tersebut Setiawan (2009: 26-29) juga mengemukakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir belum mampu membentuk masyarakat menjadi mandiri. Kondisi tersebut juga terjadi di desa pesisir yang ada di Kecamatan Teluk Naga yakni Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara. Merujuk dari hasil penelitian Amanah (2011: 223-231) menemukan bahwa nelayan di Desa Muara dihadapkan pada kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang semakin menurun kualitasnya, meliputi pencemaran air laut oleh limbah pabrik, sedimentasi semakin tinggi, dan kelembagaan nelayan yang perlu berkembang menjadi lebih kuat dan terorganisir.

Akhir tahun 2011, pemerintah dalam hal ini KKP kembali merealisasikan program di desa-desa pesisir yang rentan dengan bencana dan perubahan iklim yang disebut program

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Pelaksanaan PDPT merupakan salah satu langkah dalam menata dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2010-2014 untuk meningkatkan manfaat sumberdaya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, program PDPT diharapkan mampu membantu dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di wilayah pesisir serta memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir melalui pelaksanaan lima hal pokok yakni bina manusia, bina usaha, bina infrastruktur dan lingkungan, bina sumberdaya dan bina siaga bencana. Program PDPT bertujuan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir/ nelayan berbasis masyarakat dan memfasilitasi peran dan fungsi masyarakat sebagai agen pembangunan kelautan dan perikanan, sehingga dengan demikian, muara dari model PDPT adalah terjadinya pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim (KKP, 2011).

Rothman (2001: 27-34), mengembangkan tiga model pengembangan masyarakat yakni: (a) Model Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality development approach*), model ini yang diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dan kemajuan sosial bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Perubahan dalam masyarakat melalui Pengembangan Masyarakat Lokal dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif dari semua masyarakat dimana setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut melalui penggunaan

prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat. (b) Model Perencanaan Sosial (*Social Planning*), model perencanaan sosial merupakan proses pemecahan masalah secara teknis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan terhadap masalah sosial tertentu, seperti: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan dll. Selain itu, model Perencanaan Sosial ini mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi. (c) Model Aksi Sosial (*Social Action*) Suharto (1997: 293-295) mengemukakan bahwa aksi sosial merupakan model pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distrition of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Model aksi sosial didasari oleh satu pandangan bahwa masyarakat merupakan korban dari adanya ketidakadilan struktur. Dengan kata lain bahwa masyarakat menjadi tidak berdaya karena disengaja oleh struktur yang berlaku. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diperdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber- sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran pemberdayaan.

Sikap masyarakat terhadap program akan menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan kegiatan program pengembangan. Pentingnya sikap positif dalam menentukan keberhasilan suatu program juga dikemukakan oleh Ayunita (2006: 42-52) dimana sikap masyarakat cenderung positif terhadap program PEMP, mereka mampu memanfaatkan kegiatan program dengan baik, sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan bakul dan pengolah ikan.

Bloom Krathwohl, et., al (Wicaksono 2011: 112-119) membagi kemampuan afektif (sikap) ke dalam lima tingkatan Taksonomi yaitu: (1) penerimaan (*receiving*), yakni kepekaan seseorang dalam menerima stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. (2) menanggapi (*responding*), yakni kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif atau membuat reaksi terhadapnya objek disekitarnya, (3) Menilai atau Menghargai (*valuing*), yakni memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu obyek atau kegiatan, serta menilai baik atau buruk fenomena tersebut. (4) mengorganisasikan (*organization*), merupakan pengembangan dari nilai kedalam satu sistem organisasi, termasuk didalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, sehingga dapat didefinisikan sebagai pembentukan nilai. Tingkatan yang terakhir yakni (5) Karakterisasi berdasarkan nilai (*Characterization by Value*) yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi nilai atau karakterisasi merupakan hirarki tertinggi dalam ranah afektif Bloom, dimana nilai tersebut telah tertanam dalam diri individu, mempengaruhi emosi, dan menjadi sebuah kebiasaan dalam diri seseorang.

Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan. Pandangan

individu dan masyarakat terhadap suatu program sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharyat (2009: 1-19) bahwa setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu objek. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada individu masing-masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan dan juga situasi lingkungan. Oleh karena itu pengembangan sikap masyarakat diharapkan akan membentuk perilaku positif masyarakat dalam mendukung pengembangan desa pesisir yang tangguh. Berdasarkan uraian di tersebut, dikemukakan bahwa masalah penelitian yakni faktor apa saja yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program PDPT. Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap Program PDPT.

Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2013 di dua desa pesisir di Kecamatan Teluknaga yakni Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan menggunakan survei. Penentuan desa dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa dua desa tersebut merupakan pelaksana program PDPT. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di dua desa pesisir yakni Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya pesisir dan non pesisir dan menjadi peserta pada Program PDPT. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 200 orang, yang terdiri dari 100 orang peserta program PDPT Desa Tanjung Pasir dan 100 orang peserta program PDPT Desa Muara. Sampel penelitian berjumlah 60 responden, dipilih dengan menggunakan stratified random sampling yang diambil secara proporsional berdasarkan sebaran kegiatan kelompok peserta program PDPT di dua desa pesisir. Jenis data dalam penelitian ini terdiri

atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa data dari responden yang di peroleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan program PDPT, serta data monografi penduduk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan rank Spearman yang bertujuan untuk menganalisis tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas, dengan rumus (Riduan 2010: 132).

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

Keterangan:

$$d_i^2 = (X_i - Y_i)^2$$

r_s = koefisien korelasi rank Spearman

d_i = selisih ranking X_i dan Y_i

Y_i = ranking variabel Y_i

X_i = ranking variabel X_i

N = banyaknya pasangan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PDPT di Desa Studi

Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian masing-masing 1 meter dan 40 meter diatas permukaan laut. Secara umum lingkungan Desa Tanjung Pasir dan Muara masih sangat memprihatinkan dan terlihat kumuh, masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Akses utama masyarakat masih ada yang rusak dan tergenang air, saluran air limbah rumah tangga tidak memadai, serta penumpukan sampah. Selain persoalan sampah abrasi juga terjadi di sepanjang 3 km pantai, serta sedimentasi di sepanjang aliran sungai di Desa Muara, dan sekitar 1 km di kampung Garapan Desa Tanjung Pasir. Kampung Garapan Desa Tanjung Pasir tergolong wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini ditandai dengan seringnya banjir (rob) di pemukiman warga yang berdampak

pada meluasnya lahan produktif yang hilang dan banyaknya pemukiman penduduk yang tergenang.

Program PDPT di desa Tanjung Pasir dan Desa Muara dilaksanakan sejak tahun 2012. Pelaksanaan program PDPT di Desa Tanjung Pasir mencakup empat kegiatan yakni Bina Sumber Daya, Bina Infrastruktur dan Lingkungan, Bina Usaha, serta Bina Siaga Bencana, sedangkan pelaksanaan di Desa Muara mencakup tiga kegiatan yakni Bina Sumber Daya, Bina Infrastruktur dan Lingkungan, serta Bina Usaha. Pelaksanaan program di dua desa penelitian cukup memberikan perubahan dalam hal pembangunan infrastruktur dan lingkungan, hanya saja keterlibatan masyarakat masih sangat rendah.

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Sikap Masyarakat Pesisir Terhadap Program PDPT

Sikap hanya dapat ditunjukkan pada perilaku yang nampak. Sikap diikuti dengan kecenderungan untuk melakukan tindakan sesuai dengan objek, baik berupa dukungan maupun perasaan tidak mendukung. Hal tersebut sejalan dengan Winkel (Yunita 2011: 13) menyatakan bahwa sikap sebagai kecenderungan untuk menerima atau menolak obyek berdasarkan penilaian atas obyek tersebut. Jika obyek tersebut dinilai berguna maka seseorang akan berkecenderungan menerima secara positif, sebaliknya bila dianggap tidak berguna akan diberi reaktif negatif. Untuk terwujudnya menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan.

Pembahasan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program PDPT merujuk pada temuan penelitian yang disajikan pada Tabel 1, diperjelas dengan informasi yang didapatkan dari lokasi

penelitian serta didukung oleh teori dan hasil penelitian yang relevan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program PDPT di Desa Tanjung Pasir dan Desa Muara dianalisis dengan menggunakan Rank Spearman. Hasil analisis (Tabel 1) menunjukkan faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program PDPT, yaitu

pendidikan nonformal, tingkat kekosmopolitan, tingkat pengetahuan tentang program, tingkat dukungan tokoh masyarakat, peran kelompok, intensitas kegiatan program, kejelasan program (konteks), pengelolaan sumber daya (*input*), pelaksanaan kegiatan program (proses), serta pencapaian program (produk).

Tabel 1. Distribusi skor hubungan karakteristik personal, karakteristik lingkungan sosial dan tingkat pengelolaan program dengan Sikap Masyarakat

Variabel	Sub-Variabel	Penerimaan	Respon	Menghargai	Pembentukan Nilai
Karakteristik Personal	Umur	-0.086	-0.108	-0.057	-0.166
	Pendidikan formal	0.103	-0.015	-0.104	0.026
	Pendidikan nonformal	0.178	0.166	0.085	0.224
	Tanggung jawab keluarga	-0.052	-0.021	0.046	-0.065
	Kekosmopolitan	0.596**	0.495**	0.372**	0.474**
	Pengetahuan tentang Program	0.668**	0.457**	0.332**	0.437**
Karakteristik Lingkungan Sosial	Dukungan tokoh masyarakat	0.710**	0.556**	0.774**	0.566**
	Peran kelompok	0.680**	0.542**	0.585**	0.582**
	Intensitas kegiatan program	0.711**	0.581**	0.612**	0.636**
Tingkat Pengelolaan Program	Kejelasan Program	0.601**	0.643**	0.714**	0.684**
	Pengelolaan Sumberdaya	0.536**	0.512**	0.687**	0.622**
	Pelaksanaan Kegiatan program	0.653**	0.540**	0.674**	0.599**
	Pencapaian program	0.481**	0.500**	0.702**	0.528**

** Correlation is significant at the 0.01 level

* Correlation is significant at the 0.05 level

Cara menguji hipotesis dilakukan dengan analisis korelasi Rank Spearman. Jika nilai signifikansinya (p -value) $< 0,05$, maka terdapat hubungan yang signifikan antara peubah terhadap sikap masyarakat (Y). Hasil analisis korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa secara umum peubah karakteristik personal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap masyarakat (penerimaan, respon, menilai, dan organisasi), sedangkan karakteristik lingkungan sosial, dan tingkat pengelolaan program menunjukkan adanya

hubungan yang signifikan dengan sikap masyarakat (penerimaan, respon, menilai, organisasi) pada taraf nyata 0,05.

Karakteristik Lingkungan Sosial

Karakteristik lingkungan sosial merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap program PDPT, yang dijabarkan oleh peubah teramati: (1) dukungan tokoh masyarakat, (2) peran kelompok, (3) dan intensitas kegiatan program. Hal ini berarti bahwa karakteristik lingkungan

sosial merupakan faktor pendukung dalam mengembangkan sikap positif masyarakat untuk ikut mensukseskan kegiatan program. Intensitas kegiatan program merupakan pembentuk yang paling kuat terhadap pengembangan sikap penerimaan (0.711), respon (0.581) dan pembentukan nilai (0.636) masyarakat terhadap program PDPT. Dukungan tokoh masyarakat menjadi peubah yang paling kuat dalam membentuk sikap penilaian/penghargaan (0.774) masyarakat terhadap program PDPT. Peran kelompok juga memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan sikap masyarakat. Dimana dalam membentuk sikap penerimaan, peran kelompok memiliki nilai hubungan sebesar 0.680, merespon (0.542), menilai (0.585), dan pembentukan nilai (0.582). Dengan demikian, intensitas kegiatan program, dukungan tokoh masyarakat serta peran kelompok perlu dikembangkan lebih baik karena berpotensi paling besar dalam meningkatkan sikap masyarakat pemanfaat program untuk bersama-sama mencapai ketangguhan desa.

Lembaga yang terdapat dalam masyarakat pedesaan adalah kelompok tani (nelayan/padi), masyarakat (nelayan) biasanya menjadi bagian dari sebuah kelompok, sehingga kelompok memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Sesuai dengan pendapat Santosa (Yunita 2011: 171) yang menyatakan bahwa kelompok mempunyai pengaruh terhadap perilaku-perilaku anggotanya, yang meliputi pengaruh terhadap persepsi, sikap, dan tindakan individu. Dengan demikian, nilai, norma, interaksi dalam kelompok, kepemimpinan, dan dinamika kelompok memberikan kontribusi tersendiri terhadap bentuk pola interaksi anggotanya ketika berinteraksi dengan lingkungan diluar kelompok. Menurut Beebe dan Masterson (Yunita 2011: 171), kelompok memegang

peranan penting bagi perkembangan kepribadian dan perilaku seseorang.

Dukungan tokoh masyarakat sebagai lingkungan sosial baik berupa nasehat, informasi, ataupun dukungan secara psikologi merupakan akan sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap suatu hal. Wee (2010: 75-86) mengemukakan bahwa perlu adanya suatu komunikasi antara masyarakat dengan lingkungan sosial dalam hal pertukaran informasi berkaitan dengan program. Sejalan dengan hal tersebut Febriana (2012: 1-13) juga mengemukakan bahwa tokoh masyarakat mempunyai tugas menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dan membantu kelancaran tugas-tugas pokok lembaga masyarakat dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan, serta menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian anggota kelompok ternyata tidak terlibat aktif dan tidak mengetahui dengan jelas informasi-informasi tentang program PDPT. Pembentukan kelompok dilakukan oleh ketua kelompok yang dipilih oleh lurah/kepala desa. Terdapat beberapa anggota masyarakat yang tidak tahu kalau mereka termasuk dalam kelompok PDPT. Karena itu sehingga tidak ada rasa tanggung jawab anggota untuk terlibat penuh. Kelompok yang dibentuk lebih disebabkan karena adanya proyek atau bantuan. Kelompok seperti ini umumnya tidak bertahan lama, setelah proyek dihentikan biasanya kelompok ini akan bubar. Pengembangan kelompok secara baik menjadi sangat penting karena banyak masalah masyarakat (nelayan) yang dapat dipecahkan oleh suatu kelompok, Rukka et al., (2008: 77-86) mengemukakan bahwa keberadaan kelompok merupakan salah satu potensi yang mempunyai peranan penting dalam membentuk

perubahan perilaku anggotanya dan menjalin kemampuan kerjasama anggota kelompoknya.

Selain peran kelompok, peran tokoh masyarakat dan intensitas kegiatan program juga merupakan peubah teramati yang berhubungan dalam karakteristik lingkungan sosial. Hasil wawancara dan analisis data yang menunjukkan bahwa keaktifan tokoh masyarakat dalam memberi motivasi, informasi dan terlibat secara langsung kepada masyarakat membantu pembentukan sikap masyarakat. Sama halnya dengan intensitas kegiatan yang dilakukan pelaksana program, intensitas kunjungan pelaksana program, kegiatan pendampingan, metode pendampingan dan sebagainya juga membentuk sikap masyarakat terhadap program.

Perlu dilakukan upaya perbaikan pada kondisi lingkungan sosial masyarakat tersebut agar dapat meningkatkan sifat positif masyarakat terhadap pelaksanaan program PDPT. Beberapa hal yang perlu diupayakan perbaikannya antara lain proses pembentukan kelompok yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan petani, pengelolaan kelompok yang dapat melibatkan seluruh anggota, kesertaan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program, serta dukungan dari pelaksana program sendiri demi mewujudkan tujuan program.

Pengelolaan Program

Faktor kedua dan yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program PDPT adalah tingkat pengelolaan program. tingkat pengelolaan program menggambarkan realisasi program, kejelasan program (konteks), pengelolaan sumberdaya (*input*), proses kegiatan program dan tingkat pencapaian program. Dalam realisasi pelaksanaan program, masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang yang ada dalam lingkungan

mereka sendiri. Tenaga pendamping (pelaksana program) dalam membantu masyarakat seharusnya dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan sampai evaluasi program.

Hubungan tingkat pengelolaan program terhadap sikap masyarakat terhadap program PDPT dijabarkan dalam empat peubah teramati, yaitu: (1) kejelasan program (konteks), (2) pengelolaan sumberdaya (*input*), (3) pelaksanaan kegiatan program (proses), dan (4) tingkat pencapaian program. Kejelasan program (konteks) merupakan pembentuk yang paling kuat terhadap pengembangan sikap masyarakat terhadap program PDPT, yakni: sikap menerima (0.601), merespon (0.643), menghargai/menilai (0.714), dan pembentukan nilai (0.684).

Model perubahan sosial menurut Less dan Smith (Yunita 2011:162) menyatakan bahwa, program pengembangan yang direalisasikan di lokasi penelitian, masih menerapkan model konsensus karena masih direncanakan dan dirancang pada tingkat nasional. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu Rothman (Yunita 2011: 162) juga menyatakan bahwa untuk paradigma local development, yaitu komunitas diintegrasikan dan dikembangkan kapasitasnya dalam upaya memecahkan masalah secara kooperatif, serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat belum sepenuhnya diterapkan.

Sajogyo (Yunita 2011: 164) menyatakan bahwa program yang dilaksanakan hendaknya mampu memanfaatkan potensi kelembagaan yang berakar kuat dalam struktur masyarakat lokal mau dan mampu mengelola potensi sosial ekonomi yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatan usaha, masyarakat memerlukan modal, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan,

namun tidak selalu tersedia ataupun tidak terpenuhi di tingkat lokal. Karena itu penyuluh pertanian/tenaga pendamping bertugas mengelola sistem yang dapat memperlancar upaya masyarakat memperoleh kebutuhan tersebut baik secara individu maupun kelompok.

Hasil pengamatan di lapangan juga memperlihatkan bahwa kondisi dua desa pesisir yang tidak memperlihatkan banyak perubahan. Perubahan yang terjadi lebih banyak pada hal infrastruktur dan siaga bencana, sedangkan kondisi lingkungan masih saja terlihat tidak terawat. Sama halnya dengan kegiatan bina usaha yang diberikan kepada kelompok pemanfaat, hal tersebut ternyata belum mampu untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Pengembangan usaha tidak mampu dikelola oleh masyarakat dengan baik, bantuan dana yang diberikan hanya digunakan untuk membeli peralatan dan mesin-mesin (mesin pengolahan sampah dan mesin pembuatan *paving block*) untuk usaha, namun kemudian perlengkapan tersebut tidak digunakan untuk menjalankan usaha, melainkan hanya menjadi hiasan di dua desa pesisir tersebut.

Program PDPT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa pesisir yang rentan bencana akibat perubahan iklim, untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui pengembangan sumberdaya manusia, usaha, infrastruktur, lingkungan, dan siaga bencana. Kegiatan difokuskan di daerah rawan bencana dengan mengimplementasikan berbagai pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketangguhan dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Program ini memberikan bantuan dana dalam jumlah tertentu. Pemanfaatannya bertujuan untuk melatih penggunaan dana tersebut sebagai stimulan pengembangan pemberdayaan lebih lanjut. Dana yang ada digunakan untuk pembiayaan beberapa pembangunan

infrastruktur, lingkungan dan investasi ekonomi untuk menciptakan produktivitas yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaan program PDPT, mulai dari tahap persiapan, dimana masyarakat dilibatkan untuk memasukkan usulan pembangunan (proposal) yang mencakup bina infrastruktur dan lingkungan, bina usaha, bina sumberdaya dan siaga bencana, hanya saja masyarakat (anggota kelompok) merasa kurang dilibatkan, karena disusun oleh ketua kelompok bersama tokoh masyarakat. Menurut para anggota kelompok, sosialisasi dari pemerintah tentang program tersebut sangat kurang. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana program hanya melibatkan ketua, sekretaris, dan bendahara kelompok. Kegiatannya pun dilakukan di hotel di ibukota Kabupaten Tangerang dan di tigaraksa, sehingga anggota kelompok tidak dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi.

Penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan tiap kelompok, dilakukan oleh tokoh masyarakat, ketua dan anggota kelompok, walaupun terdapat juga beberapa anggota kelompok yang merasa tidak dilibatkan dalam penentuan jenis kegiatan kelompok. Kegiatan yang dilakukan antara lain, penanaman mangrove, pembangunan saluran air limbah, pengadaan sarana pengelolaan sampah, pembangunan MCK dan sarana air bersih, rehab sarana ibadah, pembangunan jalan paving block, pembangunan turap sungai, pengadaan perahu wisata, dan pengadaan mesin paving block. Permasalahan yang dihadapi saat ini yakni pada bina usaha belum adanya kerjasama dengan lembaga pemasaran, ataupun lembaga-lembaga terkait terutama untuk usaha kerajinan tangan, masyarakat hanya menjualnya di sekitaran pantai sehingga penjualan tidak begitu banyak. Sedangkan pada pengelolaan sampah

dan mesin pavin blok tidak mampu dikelola dengan baik oleh kelompok, sehingga mesin yang dibeli dengan menggunakan bantuan yang diberikan melalui program PDPT hanya disimpan dan tidak dioperasikan.

Menurut Soetomo (Yunita 2011: 170) menyatakan bahwa, masih banyak dijumpai kegagalan dari peran eksternal yang berlabelkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kondisi kehidupannya, tetapi hanya bertahan selama program masih berjalan. Pada saat program dihentikan, intensitasnya secara perlahan berkurang dan akhirnya berhenti. Hal itu karena program pemberdayaan tidak mampu mewujudkan proses institusionalisasi. Umumnya kelemahan program pemberdayaan yakni tidak berhasil menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan aktivitas lokal masyarakat. Masalahnya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penyampaian input program. Program pemberdayaan seharusnya menggunakan pendekatan yang mengutamakan proses belajar bukan hanya material. Program yang menggunakan pendekatan material tidak akan membentuk masyarakat mandiri, namun hanya akan membuat masyarakat bergantung kepada pelaksana program.

Karakteristik Personal

Karakteristik personal merupakan faktor terakhir yang diamati untuk melihat hubungannya dengan sikap masyarakat terhadap program. Karakteristik personal merupakan ciri khas yang melekat pada individu yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan individu tersebut. Karakteristik personal dapat menjadi pembeda yang khas antara satu individu dengan individu lainnya, yakni: (1) umur, (2) tingkat pendidikan formal, (3) pendidikan nonformal, (4) jumlah tanggungan, (5) tingkat kekosmopolitan, (6) tingkat pengetahuan.

Terdapat umur, pendidikan formal, dan jumlah tanggungan keluarga bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa ketiga peubah tersebut berhubungan negative terhadap sikap masyarakat terhadap program PDPT. Secara umum responden berkisar antara 19-60 tahun. Jika mengacu kepada batasan usia produktif menurut Rusli (Yunita 2011: 124) berkisar antara 15-65 tahun, maka 90 persen responden tergolong produktif. Piaget dan Salkind (Yunita 2011: 12) menegaskan bahwa umur berkaitan dengan tingkat kematangan biologis dan psikologis seseorang dalam melakukan aktivitas. Seseorang yang dalam usia produktif cenderung memiliki kondisi fisik dan psikis yang optimal dalam bekerja. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pakpahan (2006: 26-34) yang menyatakan bahwa pada usia produktif nelayan memiliki kondisi fisik yang baik dan membuat nelayan mampu melakukan kegiatan secara optimal dan mampu mengembangkan diri dengan baik. Artinya, pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang berada pada kelompok produktif. Korelasi negatif antara umur dan sikap menunjukkan bahwa semakin tua umur seseorang akan berdampak pada semakin rendahnya sikap terhadap objek disekitarnya.

Sama halnya dengan umur, jumlah tanggungan dan tingkat pendidikan juga memiliki korelasi yang negatif dengan sikap masyarakat terhadap program PDPT. Hal tersebut karena jumlah tanggungan keluarga berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika tanggungan keluarga banyak maka pemenuhan kebutuhanpun akan lebih banyak banyak, begitu pun sebaliknya dimana jika tanggungan keluarga sedikit maka pemenuhan kebutuhan juga sedikit. Hal tersebut menjadikan masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi yang

berbeda. Jumlah tanggungan yang berada pada kategori sedang (2-3 jiwa) juga menyebabkan responden cenderung lebih giat untuk bekerja untuk memenuhi atau menghidupi keluarganya. Sejalan dengan hal tersebut Erawati (2013: 31-40) menemukan bahwa semakin besar beban jumlah keluarga menyebabkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan akan berkurang karena sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada hakikatnya, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia, baik individu maupun sosial. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tanjung Pasir dan Muara, dapat menyebabkan kemampuan mengelola dan membangun desa menjadi kurang maksimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Prijono dan Pranaka (1996: 76-77) bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan untuk melaksanakan perannya di masa yang akan datang. Rendahnya tingkat pendidikan responden mengakibatkan nilai korelasi negatif. Sifat yang ditunjukkan oleh responden cenderung dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki. Tingkat pengetahuan terhadap program, dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang diperoleh baik dari pengelola program maupun dari tokoh masyarakat.

Pendidikan nonformal masyarakat memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap sikap masyarakat terhadap program yakni: penerimaan (0.178), respon (0.166), menghargai (0.085), dan pembentukan nilai (0.224). Hal ini menunjukkan masih rendahnya (sedikit) kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pelaksana program kepada masyarakat. Rendahnya pendidikan nonformal masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaan pendampingan

atau penyuluhan yang tidak rutin dilakukan, serta kecenderungan masyarakat yang mengikuti pelatihan hanya ketua kelompok saja. Selain itu, keaktifan masyarakat juga sangat mempengaruhi, anggota kelompok yang tidak aktif relatif tidak mengetahui informasi tentang adanya pelatihan ataupun penyuluhan yang dilaksanakan. Merujuk kepada Amanah (2003: 1-20) yang mengemukakan bahwa sebagai faktor pendukung, maka penyuluhan memegang peran penting yang berperan membantu terjadinya perubahan yang positif dalam hal pengetahuan, keterampilan teknis, sikap, motivasi serta perbaikan kemampuan berbisnis dan bermasyarakat.

Perubahan dalam karakteristik personal yang memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap sikap masyarakat terhadap program PDPT adalah tingkat kekosmopolitan: penerimaan (0.517), respon (0.376), penilaian (0.335), dan organisasi (0.462) serta tingkat pengetahuan tentang program: penerimaan (0.626), respon (0.423), penilaian (0.315), dan organisasi (0.484). Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan responden dengan dunia luar, terkait informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan terhadap kegiatan pemberdayaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program PDPT diketahui bahwa, dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, membangun sarana dan prasarana, serta membentuk kemandirian ekonomi melalui implementasi program PDPT dibutuhkan sikap positif masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan program.

Sikap positif masyarakat di dua desa pesisir dapat ditumbuhkan dari faktor karakteristik lingkungan sosial (tingkat dukungan tokoh masyarakat, peran kelompok, intensitas kegiatan program), dan tingkat pengelolaan program (kejelasan program, pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan program, tingkat pencapaian program).

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang perlu meningkatkan keterlibatan dukungan tokoh masyarakat, melakukan pengembangan/pembinaan kelompok, dan peningkatan intensitas kegiatan program, dengan meningkatkan peran pendamping program di masyarakat dengan merekrut pendamping yang tinggal di lokasi program.
2. Pelaksana program perlu peningkatan keterlibatan masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan pendekatan secara partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. (2003). Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan di Desa Anturan, Buleleng, Bali. *Buletin Ekonomi Perikanan* V(1).
- Amanah, S., Farmayanti N. (2011). Strategi Pemberdayaan Nelayan Berbasis Keunikan Agroekosistem dan Kelembagaan Lokal. *SOSIOKONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(3).
- Ayunita, NND., Mudzakir, AK. (2006). Analisis Pendapatan Bakul dan Pengolah Ikan Penerima Dana PEMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. *Buletin Ekonomi Perikanan*, VI(2).
- Erawati, I., Massadun. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono Kecamatan Sayung. *Jurnal Ruang (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota)*. 1 (1).
- Febriana, I. (2012). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa Banjurpasar Kecamatan Bulus Pesantren Kebumen. *Unnes Civic Education Journal*. 1 (2).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2011). *Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir*. Jakarta.
- Pakpahan, HT., Lumintang, RWE., Susanto, D. (2006). Hubungan Motivasi Kerja dengan Perilaku Nelayan pada Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Penyuluhan*. 2 (1).
- Pranarka, AMW., Vidhyandika, M. (1996). Pemberdayaan (*Empowerment*) dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi (Penyunting O.S. Prijono dan A.M.W. Pranarka). *Centre for Strategic For International Studies*. Jakarta.
- Prijono, OS., Pranarka, AMW. (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. *Centre for Strategic For International Studies*. Jakarta.
- Razali, I. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. 3(2).
- Riduwan. (2010). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rothman, J., John L. Erlich, JE. Tropman. (2011). *Strategies of Community Intervention*. 6 th. Manhattan: F.E. Peacock Publishers.

- Rukka, H, Buhaerah, Kadir, S. (2008). Peran Kelompok Tani dalam Pemenuhan Kebutuhan Usahatani, Kasus Petani Padi Sawah di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. *Jurnal Agrisistem*. 4 (2).
- Setiawan, J. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Carita*. Prospek. 2(1).
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharyat, Y. (2009). Hubungan antara Sikap, Minat, dan Perilaku Manusia. *Region*. 1(2).
- Wee, ST, Radzuan, ISM. (2010). Sikap Masyarakat terhadap Program Kitar Semula: Kajian Kes di Daerah Batu Pahat, Johor. *Journal of Techno-Social*. (2)1.
- Wicaksono, SR. 2011. Strategi Penerapan Domain Afektif di Lingkup Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan*. 12 (2).
- Yunita. (2011). *Strategi Peningkatan Kapasitas Petani Padi Sawah Lebak Menuju Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Ilir dan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*. Disertasi, tidak diterbitkan. Bogor: Program Pascasarjana IPB.

